

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Indriyanti Utami
NPM : 151000078
Progam Kekhusuan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan

Gialdah Tapiansari Batubara, S.H, M.H
NIPY: 15110563



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Disusun oleh

Nama : Indriyanti Utami
NPM : 151000078
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal 10 Maret 2020

Pembimbing

Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H.
NIPY: 15110563

Penguji Materi

Penguji Komprehensif

Deden Soemantry, S.H., M.H.
NIPY. 15110151

H. Absar Kartabrata, Dr., S.H., M.Hum.
NIPY. 15110047

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Disusun oleh

Nama : Indriyanti Utami
NPM : 151000078
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal 10 Maret 2020

Pembimbing

Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H.
NIPY: 15110563

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

WAKIL DEKAN I FH UNPAS BANDUNG

Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.
NIPY. 151.102.08

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : Indriyanti Utami

Npm : 151000078

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian peneliti dengan arahan dosen pembimbing.
- b. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, 4 Febuari 2020

Pembuat pernyataan

Indriyanti Utami

ABSTRAK

Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias NN binti E, terhadap ini Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun menjadi Rusunawa Baleendah yang terletak di blok Cibeurit, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung adalah tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias NN binti E, bukan tanah milik negara. Terhadap putusan tersebut Pemerintah Daerah tetap melakukan pembangunan di atas lahan sengketa. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana penyerobotan tanah oleh pemerintah daerah dalam pembangunan rusunawa, bagaimana akibat hukum penyerobotan tanah oleh pemerintah daerah dalam pembangunan rusunawa, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif, merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

Penyerobotan tanah oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan rusunawa bermula karena Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan bahwa objek sengketa secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1972 atas dasar pembebasan tanah untuk rencana pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pembangunan Rusunawa merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pemilik tanah yaitu para pemilik tanah tidak dapat lagi mengolah atau menyewakan tanah tersebut untuk mendapatkan hasil. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 385 dan 424 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perppu 51 Tahun 1960. Perlindungan hukum terhadap hak milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah telah diberikan negara melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Perppu 51 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUHP dan beberapa perundang-undangan lainnya, tetapi dalam penegakan hukumnya belum memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perlindungan, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

The Regional Government is suspected for illegal claim against the land owned by IM aka NM binti E and ER aka NN binti E. However, the Bandung District Court, the West Java High Court and the Supreme Court imposed a verdict which mentioned that IM aka NM binti E and ER aka NN binti E are the rightful owner for land developed for Baleendah Apartment, located at Cibeurit Block, Baleendah County at Baleenah Municipality, Bandung Regency. Despite the court verdict, local government continue the development program on that location. This paper discusses about the illegal land claim by the Regional Government as means to develop apartment complex, the legal consequences of the action, and legal protection upon rightful owner of the land.

Research specification was descriptive analytical. Method of approach was juridical normative, and data analysis was juridical normative qualitative. It was normative because the research focused on norms, principles, and legislations as positive law. It is qualitative because it was an analysis of data and information obtained qualitatively through legal point of view.

Illegal claim of land conducted by Regional Government, for purpose of constructing apartment, happened because since 1972 the object has been occupied by the defendant on the basis of Development Plan of Bandung Municipality Capital. The Bandung Regional Government has conduct violation by constructing apartment and caused damage to the Plaintiff because they couldn't utilize the land. According to Article 384 and 424 of the Penal Code, the regional government has conducted a crime. To protect private ownership of a land against illegal claim, specifically in this case by regional government, is to be seen under the Act No. 5/1960, No. 51/1960, the Government Regulation No.24/1997 on the Registration of Land, the Penal Code, however, law enforcement has not provided legal certainty.

Keywords: Protection, crime, illegal claim of land

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”** sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

Pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini peneliti tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan. Untuk itu peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada

1. Dr. Anthon F. Susanto, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Firdaus Arifin S.H, M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Dr. H. Dudi Warsudin S.H, M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

5. Gialdah Tapiansari Batubara, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku Dosen Pembimbing.
6. Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., selaku penguji metode sekaligus penguji komprehensif peneliti.
7. Deden Sumantri, S.H., M.H. selaku penguji materi peneliti.
8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Pengajar dan jajaran staff di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. Orang Tua peneliti Ayah Dadan Wahid. S dan Ibu Irna Marlina dan saudara kandung peneliti Indah Puspita.
10. Kakek dan Nenek peneliti Abah Idang Sopandi dan Embu Imas Mintarsih, Kakek Endang dan Nenek Yoyoh.
11. Orang Tua Rafi Bapak M. Ansyori dan Ibu Wardania yang selalu Mendoakan dan Memberi Semangat kepada Peneliti.
12. Sang Kekasih M. Rafi Ghariza yang selalu menemani dan membantu peneliti.
13. Sahabat dan support system peneliti Aziza Rachmawati, Viola Desipa, Meisha Fitriana, Alysha Nur A, Desty Ruhawaty, Trias Dewi A, Melvin Erdinta, Erwin Nurdiansyah, Bimo wikantioso, Edoward Rezky M, Zacky Radi N, Dickson Wilmar, Fazri Anandega, Raynatan Johannes, Ahmad Maulana H, Odi Matulesy, Mang Iwan, Ibu Bapak warteg, dan Kriptomary yang selalu memberi semangat.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu selama masa perkuliahan sampai akhir hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian Tugas Akhir ini peneliti menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan kurangnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan akan peneliti terima. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung , 04 Febuari 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metode Penelitian	30
1. Speifikasi Penelitian	30
2. Metode Pendekatan	30
3. Tahap Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Alat Pengumpulan Data	33
6. Analisis Data.....	33
7. Lokasi Penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH	35
A. Pengertian Hukum Pidana.....	35
B. Pengertian Tindak Pidana	44
C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	52
D. Asas Perlindungan Hukum	57

BAB III TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH.....	61
A. Kasus Posisi	61
B. Kasus Posisi 2	73
C. Tabel Putusan.....	76
D. Wawancara.....	82
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	85
A. Penyerobotan Tanah Oleh Oknum Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Rusunawa	85
B. Akibat Hukum Penyerobotan Tanah Oleh Oknum Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Rumah Susun Sewa	89
C. Perlindungan Hukum Hak Milik Perorangan Dari Penyerobotan Tanah Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.....	92
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100